PERAN TOKOH ADAT DALAM PENGELOLAAN KONFLIK SOSIAL (STUDI PADA DESA KOBAKMA 1)

(SKRIPSI)

Oleh

Riwan Helakombo
NPM. 1916021069

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024

ABSTRAK

PERAN TOKOH ADAT DALAM PENGELOLAAN KONFLIK SOSIAL (STUDI PADA DESA KOBAKMA 1)

Oleh :

RIWAN HELAKOMBO

Penyebab konflik di Desa Kobakma 1 merupakan konflik sosial antara individu dan individu, individu dan kelompok, kelompok dan kelompok, antara kedua suku yakni Suku Yali dan Suku Gem, konflik tersebut disebabkan oleh berbagai hal di lingkungan warga. Penyebab konflik itu sendiri terjadi antara individu dan individu karena, yang pertama dana desa; pembagian dana desa kedua Suku Yali dan Gem yang tidak sesuai pada sasarannya. Yang kedua adalah; konflik antara individu dan kelompok itu sendiri yang pelakunya adalah seorang pemuda kampung dari suku Yali yang mengakibatkan pertikaian antara tua-tua adat kedua suku. Yang diakibatkan munculnya konflik adalah adanya utang yang belum terpenuhi. Kemudian muncul juga konflik yang diakibatkan oleh perbedaan pendapat, pemikiran, ucapan, dan perbuatan. Yang ketiga adalah; konflik antara kelompok dan kelompok di kedua suku Yali dan Gem. Konflik yang disebabkan antara kedua suku, terkait dengan kepemilikan wilayah dan atau batas-batas wilayah adat. Kemudian pembangunan yang tidak merata kepada kepada kedua suku tersebut. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012, telah mendorong pengaturan adat dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat. Masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah pengaturan penanganan konflik sosial oleh masyarakat Kobakma 1, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Pertama bagaimana peran tokoh adat dalam menyelesaikan konflik sosial di lingkungan Suku Yali dan Suku Gem Desa Kobakma 1. Dan bagaimana kerja sama antara kedua suku di desa kobakma 1 dalam menyelesaikan masalah yang ada di kobakma 1. Sebab di daerah ini sendiri ada berbagai masalah konflik sosial yang belum terselesaikan oleh kepala suku sendiri, maka peneliti mau melihat bahwa apa yang dilakukan pihak-pihak yang terlibat dalam lingkungan masyarakat adat anatara kersajasama dengan pihak yang

terlibat di daerah tersebut dalam penyelesaian konflik sosial yang ada di lingkungan masyarakat desa kobakma 1 kabupaten Mamberamo tengah provinsi papua pegunungan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu sebagai berikut; teknik wawancara mendalam, percakapan dengan maksuk tertentu. Percapakn yang dilakukan bersama dua pihak yang terlibat yaitu pewancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2013:186). Observasi peneliti meneliti mengamati secara langsung terhadap subjek penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan ialah observasi partisipasi secara pasif, untuk mengamati tentang bagaimana Tokoh Adat dan Kepala Desa dalammenyelesaikan masalah di Desa Kobakma 1 (Sugiyano, 2024;227). Dokumentasi studi dokumentasiyang dilakukan dalam penelitian ini antara lain mengumpulkan data berupa peraturan perundang-perundang, profil instasi, dan data lain yang dianggap relevan dan mendukung analisis. Metode pengelolaan data menjelaskan prosedur pengelolaan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, logis, tidak tumpangtindih.

Kata Kunci : Peran Tokoh Adat Dalam Pengelolan Konflik Sosial

ABSTRACT

THE ROLE OF TRADITIONAL LEADERS IN MANAGING SOCIAL CONFLICT (KOBAKMA VILLAGE CASE STUDY 1)

By :
RIWAN HELAKOMBO

The cause of the conflict in Kobakma 1 Village is social conflict between individuals and individuals, individuals and groups, groups and groups, between the two tribes, namely the Yali Tribe and the Gem Tribe, this conflict is caused by various things in the community environment. The cause of the conflict itself occurs between individuals and individuals because, firstly, village funds; the distribution of village funds for the two Yali and Gem tribes was not in line with its targets. The second is; The conflict between the individual and the group itself, the perpetrator of which was a village youth from the Yali tribe, resulted in a dispute between the traditional elders of the two tribes. What results from the emergence of conflict is the existence of unfulfilled debts. Then conflicts arise resulting from differences in opinions, thoughts, words and actions. The third is; conflict between groups and groups in both the Yali and Gem tribes. The conflict caused between the two tribes is related to territorial ownership and/or customary territory boundaries. Then development was uneven among the two tribes. Law Number 7 of 2012, has encouraged customary arrangements in resolving problems in society. The problem that will be discussed in this article is the regulation of handling social conflict by the people of Kobakma 1, Kobakma District, Central Mamberamo Regency.

This research uses a descriptive research type with a quantitative approach. The results of this research are First, what is the role of traditional leaders in resolving social conflicts in the Yali Tribe and Gem Tribe of Kobakma 1 Village. And how is the cooperation between the two tribes in Kobakma 1 Village in resolving problems in Kobakma 1. Because in this area itself There are various social conflict problems that have not been resolved by the tribal chief himself, so the researcher wants to see what the parties involved in the traditional community are doing in collaboration with the parties involved in the area in resolving social conflicts that exist within the Kobakma village community. 1 Central Mamberamo Regency, Papua Mountain Province.

The data collection techniques used in the research are as follows; in-depth interview techniques, conversations with a specific purpose. Conversations are carried out with the two parties involved, namely the interviewer who asks questions and the interviewee who provides answers to those questions (Moleong, 2013: 186). Observation: Researchers observe directly the research subjects to obtain the necessary data. In this research, the observation carried out was passive participant observation, to observe how Traditional Leaders and Village Heads resolved problems in Kobakma 1 Village (Sugiyano, 2024; 227). Documentation studies carried out in this research include collecting data in the form of laws and regulations, agency profiles, and other data that is considered relevant and supports the analysis. Data management methods explain data management and analysis procedures according to the approach taken. Because research is carried out by describing data in the form of regular, logical, non-overlapping sentences.

Keywords: The Role of Traditional Leaders in Managing Social Conflict

PERAN TOKOH ADAT DALAM PENGELOLAAN KONFLIK SOSIAL (STUDI PADA DESA KOBAKMA 1)

Oleh

Riwan Helakombo

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024

Judul Skripsi	: **PERAN TOKOH ADAT DALAM PENGELOLAAN KONFLIK SOSIAL (Studi Pada Desa Kobakma 1)**
Nama Mahasiswa	: Riwan Helakombo
Nomor Pokok Mahasiswa	: **1916021069**
Jurusan	: Ilmu Pemerinthan
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Darmawan Purba, S. IP., M.IP.
NIP. 19810601 201012 1 003

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Darmawan Purba, S.IP., M.IP.** .....

   Penguji : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.** .....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610708 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **29 April 2024**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akedemik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.

2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar putaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pertanyaan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akedemik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Mei 2024
Yang membuat Pernyataan

Riwan Helakombo
NPM. 1916021069

RIWAYAT HIDUP

Penulis merupakan putra keempat dari 4 (4) bersaudara pasangan Bapak (Alm) Nebius Helakombo dan Ibu Sertina Endama. Penulis dilahirkan di Nohorwik pada jumat hari tanggal 22 Desember 2000.

Jenjang pendidikan penulis diawali dengan menjadi peserta didik di Taman Kanak-kanak (TK) Yanggul Isarukmu Iniluk Aduk Nohorwik. Pendidikan selanjutnya pada Sekolah Dasar (SD) Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Pass-valley selesai pendidikan sekolah dasar tahun 2013. Pendidikan tingkat mengenah pertama penulis selesaikan di SMP N Kobakma pada tahun 2016. Penulis melanjutkan pendidikan tingkat mengenah atas di SMKN 9 Kota Malang dan lulus pada tahun 2019.

Selama penulis melaksanakan studi di jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP-UNILA berbagai kegiatan diikuti baik akedemik maupun non akedemik demi menunjang kapasitas pribadi diri penulis. Tahun 2019-2020 penulis pertama kali melangkah untuk berhimpung di Ikatan Mahasiswa Papua Lampung (IKMAPAL) dan mendapat amanah yang lebih besar sebagai Ketua IKMAPAL. Tahun 2020-2021 penulis kedua kali melangkah untuk berhimpung menjadi anggota GMKI Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, dilanjutkan pada periode berikutnya 2021-2022 penulis mendapat amanah yang lebih besar sebagai Sekfung Kemasyarakatan di bidang aspel.

Pada tahun 2022 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ditempatkan di Pekon Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Kemudian di tahun 2023 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Bahasa Unila. Untuk melanjutkan mengasah kapasitas pribadi penulis pada tahun 2023 tercatat sebagai anggota biasa Ikatan Mahasiswa Papua Lampung setelah menjalan amanah yang dipercayakan. Tahun 2023 penulis mendapat amanah sebagai Kepala Bidang Aksi dan Palayanan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Bandar Lampung.

Demikian berbagai macam aktivitas penulis sejak rentan tahun 2019 hingga 2023. Seluruh aktivitas yang penulis lakukan hanyalah berusaha untuk melakukan kegiatan positif dan memberikan kebermanfaatan bagi diri sendiri maupun orang lain. Ouput yang diharapkan dari semua ini tidak lain ialah untuk mendukung perolehan ilmu pengetahuan dan pengembangan kapasitas diri.

MOTTO

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
(Filipi 4:13)

Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia.
(Nelson Mandela)

Di atas batu ini saya meletakkan peradaban Orang Papua. Sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan merifat untuk memimpin bangsa ini, mereka tidak dapat memimpin bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri.
(Domine Isaak Samuel Kijne.)
Bukit Aitumeri, 25 Oktober 1925).

Saya percaya berdasarkan iman saya, suatu ketika saya akan bangkit dan memimpin diatas tanah dan negeri ini Papua.
(I . S . Kijne)

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ilmiah sederhana ini untuk….

Alm. Bapak dan Kaka Tercinta

Yang Tidak henti perhatian dan Doa demi Keberlangsungan Anakmu dan Adikmu Menjalani Hidup dan Keharusan Universal.

Betapa buah hatimu tidak kuasa untuk membalas setiap pengorbanan dan Doa yang tidak henti terpanjat demi membesarkan putra bungsu tersayang menjadi insan yang berguna sesuai harapan

Bapak dan Kaka tercinta.

Kakaku Tersayang Sostin Helakombo

Para Guru – guruku yang saya hormati.

Almamater Tercinta

Dan

Organisasi Perjuangan Bermartabat.

SANWACANA

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Lantunan kata-kata indah memuji dan mengagungkan dzat yang Maha Mulia. Berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa tak terbendung memberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " **Peran Tokoh Adat Dalam Pengelolaan Konflik Sosial *(Studi Pada Desa Kobakma 1)".***

Sanjungan salam dan Doa yang tidak lupa saya secara pribadi menyampaikan kepada Darmawan Purba, S . IP. , M . IP. sungguh gerekan revolusioner yang telah tergores dalam sejarah memberikan inspirasi dan teladan yang begitu luar biasa bagi saya untuk menjadi orang yang berguna.

Skripsi ini merupakan karya ilmuah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Data yang tersaji dalam skripsi ini mustahil dapat terwujud dengan baik. Suatu kehormatan dan kebanggan bagi penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Allah SWT atas segala apa yang Engkau berikan kepada hamba-mu yang selalu khilaf terhadap segala nikmat-mu. Terima kasih banyak atas segala limpahan nikmat iman, nikmat kepercayaan dan nikmat atas sehat jasmani yang selalu tercurah dalam setiap proses dalam kehidupan yang hamba-mu jalani.

2. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D. E. A. IPM, selaku Rektor Universitas Lampung.
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M. Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Darmawan Purba, S. IP, M. IP, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan dan selaku Pembimbing utama dan penulis. Terima kasih banyak atas waktu dan saran yang diberikan kepada penulis selama proses bimbingan. Semoga Allah SWT selalu melindungi di setiap langkah bapak dan semoga selalu diberikan kesehatan.
5. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M. IP, selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan dan selaku Penguji utama penulis. Terima kasih banyak atas waktu dan saran yang telah diberikan kepada penulis selama proses penguji. Semoga Allah SWT selalu melindungi di setiap langkah bapak dan semoga selalu diberikan kesehatan.
6. Bapak Juantara, S. I. P. , M. A. selaku Dosen Pembahas. Terima kasih banyak atas segala kritik, saran dan motivasinya yang telah bapak berikan kepada penulis selama proses penguji. Semoga Allah SWT selalu melindungi di setiap langkah bapak dan semoga selalu diberikan kesehatan.
7. Dosen-dosen Keluarga Besar penulis di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universita Lampung. Pak Ismono Hadi, Pak Denden, Pak Piping, Pak Bendi, Pak Pitojo, Pak Hermanto, Pak Aman Tato, Pak Maula, Pak Robi Cahyadi, Pak Budi Kurniawan, Pak Arizka, Pak Andri Marta, (Alm) Pak Yana, (Alm) Pak Suwondo, (Alm) Pak Syafarudin, Ibu Ari Darmastuti, Ibu Feni Rosalia, Ibu Kris Ari, Ibu Lilih. Bersyukur dapat mengenal bapak dan ibu dosen. Terima kasih banyak menjadi perantara bagi penulis untuk merengguh ilmu pengetahuan.
8. Bapak dan Ibu Staf di Jurusan Ilmu Pemerintahan. Mas Juni mohon maaf jika selalu merepotkan untuk menyananyakan administrasi. Mbak Shela, mohon maaf jika selalu diganggu untuk urusan administrasi. Mas Dede, punggawa gedung D yang tangguh dan sabra menunggu jika kegiatan di gedung belum selesai (sehat selalu mas). Kiyai Samsuri dan Kiyai Herman Terima kasih banyak.

9. Kedua orang tua saya yang saya cintai dan banggakan, Bapak dan Kaka saat ini anakmu dan adikmu telah berhasil menjadi sarjana semoga ayah dapat tersenyum di Surga sana dengan apa yang telah Riwan capai saat ini. Mama Terima kasih banyak unuk kedua tanganmu yang tanpa henti memanjatkan doa untuk anakmu. Terima kasih banyak, Bapa dan Mama serta Keluarga untuk segala yang telah kalian berikan sehingga anakmu saya atas doa dan harapannya,
10. Untuk teman berantem, adikku tersayang Aminus Barusa semangat untuk kuliahnya dan mencapai keinginannya. Selalu menjadi kebanggaan keluarga.
11. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Papua Lampung (IKMAPAL), Komunitas Mahasiswa Papua Se-Sumatera (KOMPASS), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Bandar Lampung. Terima kasih banyak atas doa dan motivasinya. Puji Tuhan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa apa yang ditunggu-tunggu telah tercapai.
12. Sahabat – sahabat kawan seperjuangan angkatan 2019 di Bandar Lampung. Terima kasih banyak atas kekompakan dan kerjasamanya akhirnya telah sampai di tahap ini, kawan-kawan kita semuannya sukses. Jalani dan kita focus pada tujuan utama kita. Terima kasihbanyak.
13. Kawan seperjuangan Keluarga Besar Ilmu Pemerintahan 2019. Farhan (Sosok yang terpilih ketua angkatan 2019) dan kawan-kawan seperjuangan yang belum sebutkan 1 persatu semuanya. Terima kasih banyak telah mencacatkan cerita di sejarah kehidupan dari awal menginjakkan kaki FISIP, makrab sampai melangkah kembali keluar dan semoga dapat sukses di dunianya masing-masing.
14. Keluarga kecil KKN Srigading, Labuhan Maringgai Lampung Timur: Ibu Titis, Ibu sakira, Ibu Putri, Mas Ari, Pak Yono, Pak Suktiyono, dll. Terima kasih banyak atas kebersamaannya, semoga Bapak dan Ibu sehat selalu dalam setiak aktivitasnya.
15. Keluarga Besar SMKN 9 MALANG, serta Para Guru yang telah memberikan dorongan motivasi dan Kawan-kawan seperjuangan. Terima kasih banyak atas kebersamaannya selama kurang lebih 3 tahun di Kota Malang. Semoga sehat selalu dalam setiap aktivitasnya. Serta para guru serta staf yang memberikan

dedikasinya penuh kepada para muridnya (Panjang umur dan sehat selalu bapa Ibu guru)

Penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian semua. Akhir kata semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kelangsungan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Mei 2024

Riwan Helakombo

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI..... i

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR..... iv

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan Masalah 8

1.3 Tujuan Penelitian 8

1.4 Manfaat Penelitan 9

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Konflik 10

2.1.1 Tentang Konflik 10

2.1.2 Penyebab Konflik 14

2.1.3 Konflik Sosial 17

2.2. Pemerintah Desa 18

2.2.1. Pengertian Pemerintah Desa 18

2.2.2. Peran Pemerinta Desa 19

2.2.3. Fungsi Pemerintah Desa 21

2.3. Pemuka Masyarakat / Adat 22

2.3.1. Pengertian Pemuka Masyarakat / Adat 22

2.3.2. Peran Pemuka Masyarakat / Adat 23

2.3.3. Fungsi Pemuka Masyarakat Adat 23

2.4. Peran 24

2.4.1. Peran Tokoh Adat 25

2.4.2. Tokoh Masyarakat 26
2.4.3. Tokoh Pemuda 27
2.4.4. Tokoh Gereja 27
2.5. Kerangka Konsep 28

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian 29
3.2. Lokasi Penelitian 30
3.3. Fokus Penelitian 30
3.4. Informasi Penelitian 31
3.5. Sumber Data 31
3.6. Teknik Pengumpulan Data..... 32
3.7. Teknik Pengelolan Data 33
3.8. Teknik Analisis Data 35
3.9. Teknik Keabsahan Data 36

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Desa Kobakma 1 41
4.2 Pengelolaan Konflik Sosial di Desa Kobakma 1 43

V. PEMBAHASAN DAN HASIL

5.1 Hasil Pelitian..... 45
5.1.1 Pencegahan Konflik..... 45
5.1.2 Penangganan Konflik..... 47
5.1.3 Pemulihan Pasca Konflik..... 48
5.1.4 Resolusi Konflik 51
5.1.5 Tranformasi Konflik 51
5.2 Pembahasan..... 61
5.2.1 Pencegahan Konflik..... 61
5.2.2 Penangan Konflik..... 62
5.2.3 Pemulihan Pasca Konflik..... 64
5.2.4 Resolusi Konflik 65
5.2.5 Tranformasi Konflik 67

VI. PENUTUP

6.1. Kesimpulan 69

6.2. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Penyebab Konflik 4
Table 2: Penelitian Terdahulu dan Sejenis..... 6
Tabel 3: Informan/Responden Penelitian 32
Tabel 4: Penyebab konflik 43
Tabel 5: Pengelolaan Konflik Sosial oleh Dewan Adat dan Kepala Desa..... 51

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Foto Wawancara Bersama Bapak Dewan Adat Desa Kobakma 1. Kecematan Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan 78
2. Foto Wawancara Bersama Kepala Desa Kobakma 1. Kecematan Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan 78

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyebab konflik di Desa Kobakma 1 merupakan konflik sosial antara individu dan individu, individu dan kelompok, kelompok dan kelompok, antara kedua suku yakni Suku Yali dan Suku Gem, konflik tersebut disebabkan oleh berbagai hal di lingkungan warga. Penyebab konflik itu sendiri terjadi antara individu dan individu karena, yang pertama dana desa; pembagian dana desa kedua Suku Yali dan Gem yang tidak sesuai pada sasarannya. Yang kedua adalah; konflik antara individu dan kelompok itu sendiri yang pelakunya adalah seorang pemuda kampung dari suku Yali yang mengakibatkan pertikaian antara tua-tua adat kedua suku. Adanya utang yang belum terpenuhi. Kemudian muncul juga konflik yang diakibatkan oleh perbedaan pendapat, pemikiran, ucapan, dan perbuatan. Akibat terjadinya konflik/pertikaian yaitu adanya interaksi sosial karena interaksi sosial merupakan hubungan antara manusia yang sifat dari hubungan tersebut adalah dinamis artinya hubungan itu tidak statis, selalu mengalami dinamika. Hal yang muncul ketika satu manusia berhubungan dengan manusia lainnya adalah :

a. Hubungan antar individu satu dan individu lain
b. Individu dan kelompok
c. Kelompok dan kelompok

Interaksi sosial terjadi jika dua orang bertemu, kemudian saling menegur sapa, berjabat tangan bahkan sampai terjadi perkelahian ataupun konflik dan sebagainya. Dari peristiwa tersebut terdapat dua pihak dimana salah satu pihak memberikan aksinya kemudian pihak lainnya memberikan respon (reaksi) terhadap aksi tersebut, maka dari sinilah kegiatan antara aksi dan reaksi dimulai. Kegiatan manusia

dimana salah satu pihak memberikan aksinya dipihak lain meresponnya atau memberikan reaksi, maka kegiatan itu disebut interaksi.

Interaksi sosial antara kelompok-kelompok manusai terjadi pula di dalam masyarakat. Interaksi tersebut lebih nyata ketika terjadi benturan antara kepentingan individu dan kelompok-kelompok jika antara kelompok terdapat kesamaan-kesamaan tertentu maka akan terjadi kerja antar kelompok sosial, sebaliknya jika diantara kelompok-kelompok terdapat beberapa perbedaan, maka kemungkinan akan terjadi konflik antara kelompok sosial. Interaksi sosial hanya berlansung antara pihak-pihak jika terjadi reaksi terhadap dua belah pihak. Beberapa konflik sosial yang pernah terjadi di Indonesia yaitu Konflik Kekerasan di Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat fenomena konflik kekerasan telah menunjukan intensitasnya, baik dalam bentuk konflik horizontal antara warga, konflik suatu golongan keagamaan dengan masyarakat sekitarnya dan yang masih segar dalam masyarakat.

Terkait peran tokoh dalam pengelolaan konflik sudah banyak menjadi perhatian berbagai kalangan yang disertai berbagai kajian yang berusaha mencari formula pengelolaan konflik sosial. Salah satunya Adityo, R. D. (2017). Yang mengemukakan bahwa dalam upaya pengelolaan konflik harus ada keterlibatan tokoh agama dan tokoh adat dalam mendorong hafirnya peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kearifan lokal. Oleh karena itu, untuk menjadikan kearifan lokal sebagai model dalam pengelolaan konflik, maka perlu direvitaliasi dan sosialisasikan secara sistematis dan massif sehingga dapat fungsional sebagai model pengelolaan konflik sosial di masyarakat Desa Kobakma 1.

Pendapat lain dikemukakan oleh Fahham, A. M. (2016) yang menerangkan bahwa tokoh agama berperan dalam penanganan sosial konflik di Sambas pada fase pasca-konflik, mereka berperan aktif dalam membangun kembali socra/ interaksi dengan, misalnya, mengadakan forum secara teratur untuk dialog antara pihak-pihak yang berkonflik.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Rosyid, M. (2017) yang menerangkan bahwa sistem peringatan dini perlu dikembangkan untuk mencegah konflik serupa

terulang kembali di negeri ini. Penyebab konflik harus diselesaikan seperti berdasarkan temuan Tim Pencari Fakta Komite Muslimin Tolikara (Komat): Pelaku kejahatan harus dibawa ke pengadilan; pemberitahuan yang dikeluarkan oleh GIDI harus dievaluasi; Forum Antar Umat Beragama (FKUB) harus berimbang antara semua keyakinan agama; Perda pelarangan pembangunan tempat ibadah selain gereja GIDI harus dievaluasi.

Adapun pendapat yang lain juga dikemukakan oleh Hadi, W. (2019) yang mengetahui upaya yang dilakukan Satuan Polisi Mimika dan kendala yang ada dalam mencegah perang suku di Kecamatan Kwamki Narama Kabupaten Mimika. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Polres Mimika telah menerapkan pendekatan hortikultura di Polmas serta negosiasi dan mediasi dalam menangani konflik. Penyelesaian konflik pada masyarakat Mimika lebih banyak menggunakan hukum adat berupa kesepakatan antar suku sebagai pihak yang berkonflik. Bentuk perjanjian berupa denda atau materi itu dapat dibagi untuk Waimum (panglima perang), korban dan pasukan perang. Unit Binmas berupaya untuk mengurangi sosial konflik di Distrik Kwamki Narama dengan pendekatan hortikultura, adopsi pendekatan polmas, negosiasi, dan mediasi/perdamaian.

Kemudian ada juga yang dikemukakan oleh Thalib, (2012) yang menyatakan bahwa dinamika pembangunan khususnya di kota-kota besar mengakibatkan kebutuhan tanah semakin meningkat dan persediaan tanah sangat terbatas, sehingga penambahan kebutuhan yang satu akan mengurangi persediaan tanah untuk kebutuhan yang lain. Hal ini di samping menimbulkan alih fungsi tanah berupa konversi lahan pertanian ke non-pertanian juga mengakibatkan hilangnya akses dan kontrol masyarakat terhadap tanah serta mengancam bagi menurunnya jaminan produksi pertanian. Data ini menunjukan bahwa konversi lahan pertanian ke non-pertanian di Pulau Jawa telah mencapai jumlah total 90. 000 hektar sepanjang periode tahun 1983 s/d 1993.

Tabel 1: Penyebab Konflik

No	Pihak yang berkonflik	Penyebab	Dampak
1	Kelompok dan kelompok	Dana Desa	Terjadi Pertikaian Sampai Terluka
2	Individu dan kelompok	Di Masyarakat Terjadi Pertikaian Antara Pemuda Dan Orangtua	Terjadi Pertikaian Sampai Meninggal Dunia
3	Kelompok dan kelompok	Pembangunan Gedung Gereja	Terjadi Keributan Antara Masyarakat
4	Individu dan kelompok	Ada Masyarakat Yang Membuka Lahan Milik Warga Lain	Terjadi Keributan Antara Masyarakat
5	Individu dan kelompok	Perpindahan Penduduk	Terjadi Keributan Antara Masyarakat Dan Kepala Desa
6	Kelompok dan kelompok	Tempat Penjualan Warga	Terjadi Keributan Antara Warga
7	Kelompok dan kelompok	Pemilihan Kepala Desa	Terjadi Keributan, Pertikaian Sampai Terluka
8	Individu dan kelompok	Pembangunan Rumah Warga	Kencemburuan Hingga Terjadi Keributan
9	Hubungan antara individu satu dan invidu lain	Membentuk Kelompok – Kelompok	Keributan Sampai Pertikaian
10	Individu dan kelompok	Perjudian	Terjadi Keributan Antara Orangtua Dan Kepala Desa

Sumber 1 diatas adalah jenis kualitatif penelitian secara langsung 2023.

Konflik sosial juga terjadi dikarenakan kenakalan remaja, sering kali terjadi kenakalan remaja ditiap wilayah salah satunya di desa kobakma 1. Kenakalan yang mereka lakukan seperti perkelahian/pertikaian, satu orang yang melakukannya maka semua orang akan kena, itulah yang membuat sebuah konflik menjadi besar dan melibatkan satu desa terlibat. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik yaitu masalah minuman yang beralkohol sehingga memicu timbulnya konflik yang tidak terelakkan. Hal ini dipacu oleh masyarakat dan pemuda yang kurang aktivitas dan banyak menghabiskan waktu untuk berkumpul-kumpul bersama teman-teman mereka.

Desa kobakma 1 pada awalnya adalah desa yang memiliki kultur budaya yang kental akan keagamaan dan nilai-nilai sosial budaya, warga masyarakat pun selalu rukun dalam kehidupan sosial ketika terjadi suatu persoalan yang menjadikan warga berpecah karena lahirnya suatu kenakalan remaja dan pemuda sehingga membuat warga saling menyalahkan dikarenakan sering kali terjadi perkelahian antara warga di desa kobakma 1. Perkelahian antar warga yang terjadi yaitu diantaranya adanya para remaja yang pulang dari sekolah mereka saling mengolok-olok sehingga terjadi perkelahian, kemudian ada pemuda yang suka meminum-minuman keras setelah itu para pemuda tersebut berkelahi dengan orang-orang di desa tersebut dan kadang ketika ada acara orgen tunggal malam maka tetap ada diantara generasi muda yang berkelahi dan pada saat terjadinya perkelahian tersebut sehingga dengan itu keterlibatan masyarakat maupun lembaga desa melibatkan diri dalam menyelesaikan konflik tersebut.

Peran pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menjadi penentu keberhasilan, hal ini disebabkan pemerintah desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan otonomi desa yang dipilih langsung oleh warganya. Pemerintah desa yang dimaksud di sini adalah kepala desa dan perangkatnya, sesuai dengan pasal 12 ayat 1 peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa. Dalam melaksanakan urusan kemasyarakatan, pemerintah desa dituntut lebih tanggap menyikapi dan menyelesaikan konflik yang terjadi di tengah-tengah warganya, pemerintah desa mampu bersifat netral, dengan mengedepankan prinsip kebenaran tanpa harus memihak. Sesungguhnya dibalik berulangnya tindak kekerasan seperti perkelahian antar kelompok, antar masyarakat

ataupun pemuda yang berujung konflik tersimpan persoalan yang sangat pelik. Itu menunjukkan bahwa sebuah wilayah telah kehilangan modal sosial, nilai kemasyarakatan yang di anut, musyawarah dan toleransi antar sesama yang diakui sebagai perekat nilai kemasyarakatan ataupun saling menghargai satu sama lain. Tingginya konsumsi minuman keras yang terjadi di desa Kobakma 1 merupakan salah satu faktor memicu terjadinya konflik diantara masyarakat.

Minuman keras yang dapat menghilangkan pikiran jernih ataupun memabukkan dapat memicu pertikaian, menyebabkan saling ejek atau memukul dengan tidak sengaja pada teman dan munculnya sikap dendam. Faktor penyebab terjadinya konflik di Desa Kobakma 1 adalah :

a. Minuman keras
b. Hiburan malam
c. Mengolok – olok antar warga
d. Kurangnya Pendidikan

Memicu konflik yang ada di kalangan masyarakat disebabkan oleh 4 faktor diatas, yang mana budaya minum – minuman keras lah yang paling memberikan efek buruk bagi masyarakat yang ada. Mereka minum – minuman keras hingga menyebabkan hilang akal sehat yang mengakibatkan terjadinya perkelahian antar pemuda dan bahwa bisa meluas ke antar desa. Minimnya tingkat Pendidikan di Papua menyebabkan mereka sulit untuk dapat menyerap edukasi yang sudah di berikan oleh pemerintah desa untuk bisa menjauhi minuman beralkohol serta saling menghormati antar masyarakat desa.

Table 2 : Penelitian Terdahulu dan Sejenis

No	Judul	Penulis /Tahun	Hasil Penelitian
1	Studi Normatif Legalitas Peran Tokoh Masyarakat Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2012.	Adityo, R. D. (2017)	Untuk menjadikan kearifan lokal sebagai model dalam pengelolaan konflik, maka perlu direvitaliasi dan sosialisasikan secara sistematis dan massif

No	Judul	Penulis /Tahun	Hasil Penelitian
	Tentang Penanganan Konflik Sosial		sehingga dapat fungsional sebagai model pengelolaan konflik di Desa Kobakma 1.
2	Peran Tokoh Agama dalam Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat.	Fahham, A. M (2016)	penanganan sosial konflik di Sambas pada fase pasca-konflik, mereka berperan aktif dalam membangun kembali socra/ interaksi dengan, misalnya, mengadakan forum secara teratur untuk dialog antara pihak-pihak yang berkonflik.
3	Peran Pranata Adat Dalam Pencegahan Konflik Antara Kelompok Masyarakat Adat. *Jurnal Preferensi Hukum*, *1*(1), 133-138.	Dauh, I. P. A. A. , Sukadana, I. K. , & Widyantara, I. M. M. (2020).	Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah pengaturan penanganan konflik sosial di Indonesia menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 dan peran pranata adat dalam penanganan konflik sosial dalam masyarakat heterogen Indonesia.

Sumber: Diolah Peneliti (2023)

Penelitian pertama oleh Adityo, R. D. (2017). Yang mengemukakan bahwa dalam upaya pengelolaan konflik harus ada keterlibatan tokoh agama dan tokoh adat dalam mendorong hadirnya peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kearifan lokal. Oleh karena itu, untuk menjadikan kearifan lokal sebagai model dalam pengelolaan konflik, maka perlu direhabilitasi dan disosialisasikan secara

sistematis dan massif sehingga dapat fungsional sebagai model pengelolaan konflik di masyarakat Lombok.

Penelitian kedua oleh Fahham, A. M. (2016) yang menerangkan bahwa tokoh agama berperan dalam penanganan konflik sosial di Sambas pada fase pasca-konflik, mereka berperan aktif dalam membangun kembali humoris/interaksi dengan, misalnya, mengadakan forum secara teratur untuk dialog antara pihak-pihak yang berkonflik.

Penelitian yang ketiga oleh Rosyid, M. (2017) yang menerangkan bahwa sistem peringatan dini perlu dikembangkan untuk mencegah konflik serupa terulang kembali di negeri ini. Penyebab konflik harus diselesaikan seperti berdasarkan temuan Tim Pencari Fakta Komite Muslimin Tolikara (Komat): pelaku kejahatan harus dibawa ke pengadilan; pemberitahuan yang dikeluarkan oleh GIDI harus dievaluasi; Forum Antar Umat Beragama (FKUB) harus berimbang antara semua keyakinan agama; Perda pelarangan pembangunan tempat ibadah selain gereja GIDI harus dievaluasi.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah bagaimana peran Tokoh Adat dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan konflik sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat Kec Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Sehubungan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran tokoh adat dalam pengelolaan konflik sosial di lingkungan Desa Kobakma 1

2. Sehubungan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Kepala Desa dalam pengelolaan konflik sosial di lingkungan Desa Kobakma 1
3. Sehubungan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran tokoh adat dan Kepala Desa serta Pihak Tni/Polri dalam pengelolaan konflik sosial di lingkungan Desa Kobakma 1

1.4 Manfaat Penelitian

Yang menjadi manfaat dalam Penelitian ini adalah :

1. Secara akedemis
   penelitian ini untuk menambah hasil keilmuan bidang pemerintahan khususnya peran tokoh masyarakat adat dan pemerintah desa dalam pengelolan konflik sosial
2. Secara praktis
   penelitian ini memiliki manfaat kepada pemerintah desa, tokoh adat dan masyarakat dalam menjaga harmoni sosial melalui pengelolaan konflik sosial yang baik.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Pustaka

2.1.1 Tentang Konflik

Menurut (Lewis A. Coser, 2009) konflik dapat merupakan proses yang bersifat alam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menempatakan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat Kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial dan sekelilingnya. Menurut Coser konflik dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Konflik Realistis, berasal dari kekecewaan terhadap tuntunan – tuntunan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan, dan yang ditunjukan pada obyek yang dianggap mengecewakan.
b. Konflik Non-Realistis, konflik yang bukan berasal dari tujuan – tujuan saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak. Coser menjelaskan dalam masyarakat yang buta huruf pembasan dendam biasanya melalui lima gaib seperti teluh, santet dan lain-lain. Sebagaimana halnya masyarakat maju melakukan mengkambinghitamkan sebagai pengganti ketidakmampuan melawan kelompok yang seharusnya menjadi lawan mereka.

Teori konflik Fahham, 2016 merumuskan kembali teori konflik dalam empat pandangan tentang konflik, yaitu: Tidak terlepas dari pengertian konflik di atas, masalah pokok yang perlu diketahui dalam konflik adalah bagaimana konflik itu diakhiri atau diselesaikan, di samping upaya pemahaman seputar akar penyebab konflik yang terjadi. Pertanyaan yang

mengemukakan dalam konteks penyelesaian konflik itu adalah bagaimana penanganan konflik itu didekati dan siapa saja yang terlibat di dalamnya.

Resolusi konflik merupakan *terminology* ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses terbuka dalam membagi proses penyelesaian konflik dalam beberapa tahap sesuai dengan dinamika siklus konflik. Ada empat hal yang perlu diperhatikan ketika konflik dikendalikan lewat resolusi konflik.

1. Terjadinya konflik tidak boleh hanya dipandang sebagai suatu fenomena politik-militer, namun harus dilihat sebagai suatu fenomena sosial. Penanganan konflik atau *conflict resolution lazimnya* dibedakan dari pengelolaan dan penyelesaian konflik.
2. Konflik memiliki suatu siklus hidup yang tidak berjalan linier. Siklus hidup suatu konflik yang spesifik sangat tergantung dari dinamika lingkungan konflik yang spesifik pula.
3. Sebab-sebab suatu konflik tidak dapat direduksi ke dalam suatu variable tunggal dalam bentuk suatu proposisi kausalitas bivariet. Suatu konflik sosial harus dilihat sebagai suatu fenomena yang terjadi karena interaksi bertingkat berbagai faktor.
4. Resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara optimal jika dikombinasikan dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik lain yang relawan. Suatu mekanisme resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara efektif jika dikaitkan dengan upaya komprehensif untuk mewujudkan perdamaikan yang langgeng.

Di sisi lain, ada juga yang berupaya membedakan antara manajemen, penyelesaian konflik dengan resolusi konflik. Manajemen konflik adalah kecapakan dalam mengelola sehingga konflik dapat ditampung dan dibatasi. sedangkan penyelesaian adalah wewenang yang dimiliki untuk memaksa sebuah konflik untuk selesai. Baik mengelola maupun menyelesaikan konflik, pendekatan yang biasanya digunakan adalah struktural, sementara pihak yang terlibat dalam proses itu biasanya aktor-aktor yang terbatas hanya pada pemerintah dan aparat keamanan. Resolusi konflik adalah

upaya penghentian konflik secara analitis dan menyentuh dasar permasalahan dalam konflik. pada konsepnya yang demikian, resolusi konflik, menurut Galtung, tidak berhenti pada upaya penanganan ketika konflik terjadi saja, atau ketika konflik telah selesai, tapi juga pada tahap sebelum konflik itu terjadi. Dengan kata lain, resolusi konflik adalah upaya penanganan konflik secara menyeluruh tidak terpisah-pisah.

Konflik adalah suatu proses sosial antara dua orang, dua kelompok, atau lebih yang salah satu pihaknya berupaya menyingkirkan yang lain dengan menghancurkan atau membuatnya tak berdaya. Sebagai proses sosial, konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawah individu yang terlibat dalam suatu interaksi. Perbedaan itu bisa menyangkut ciri fisik, tingkat kemampuan, adat dan tata cara, keyakinan, dan lain sebagainya. Dari segi definisi, Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa konflik merupakan pertentangan untuk berusaha memenuhi tujuan dengan jalan menetang pihak lawan. Sedangkan, menurut Lewis A. coser dalam bukunya *The Functions of Social Conflict (Dlenceo, IL: Free Press, 1959),* konflik adalah perjuangan nilai atau tuntutan atas status, konflik juga merupakan bagian yang akan selalu ada dalam masyarakat (inheren). Konflik akan hilang jika masyarakatnya hilang. Jadi bisa dibilang sebenarnya kita tidak perlu bingung denga nada dan tidaknya konflik sebab keduanya itu serupa hubungan antara kompetisi dan kooperasi. Dalam situasi kompetitif, dua kelompok mempunyai tujuan yang tidak sama yang bermuara ke konflik. Namun, konflik dapat menjadi sesuatu yang kooperatif dan mengarah pada integrasi jika terkontrol. Ada beberapa faktor pemicu terjadinya konflik menurut Soerjono Soekanto :

a. Perbedaan pendirian dam perasaan individu
b. Perbedaan latar belakang kebudayaan hingga seseorang akan terpengaruh oleh pola pikir dan pendirian kelompok. Alhasil terbentuklah pribadi yang berbeda-beda.
c. Perbedaan kepentingan antara pribadi dan kelompok yang antara lain mencakup bidang sosial, politik, dan ekonomi.

d. Perubahan nilai yang cepat dan mendadak sehingga membuat culture shock dalam masyarakat.

Manusia adalah makhluk konfiliktis (homo confilictus), yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan baik sukarela maupun terpaksa. Dalam kamus umum bahasa Indonesia yang disusun Poerwadarminta (1976), konflik berarti pertentangan atau percekcokan. Pertentangan itu sendiri bisa muncul ke dalam bentuk pertentangan ide maupun fisik antara dua belah pihak berseberangan. Francis menambahkan unsur persinggungan dan pergerakan sebagai aspek tindakan sosialnya (Francis, 2006). Sehingga secara sederhana konflik adalah pertentangan yang ditandai oleh pergerakan dari beberapa pihak sehingga terjadi persinggungan.

Secara garis besar konflik adalah perselisihan atau persengketaan antara dua atau lebih kekuatan baik secara individua tau kelompok yang kedua belah pihak memiliki keinginan untuk saling menjatuhkan atau menyingkirkan, mengalahkan atau menyisihkan.

Dari pengertian tersebut kita dapat membandingkan bahwa konflik tidak mesti berwujud kekerasan. Perlu dipahami bahwa walaupum pada dasarnya pengertian antara konflik dan kekerasan terdapat perbedaan, akan tetapi keduanya memiliki hubungan yang erat, sebab tidak ada kekerasan tanpa diawali oleh gejala konflik terlebih dahulu. Kendati demikian, gejala konflik tidak mesti berujung pada kekerasan. Kekerasan akan terjadi jika konflik yang dialami oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya tidak mampu menyelesaikannya.

Akan tetapi hubungan konflik dan kekerasan merupakan bentuk hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Kekerasan selalu di identikan dengan kerusuhan, pembunuhan, terorisme, perampokan dam sebagainya asal-muasalnya berasal dari konflik. Dalam hal ini, pengertian konflik adalah “benturan” antar-individu atau antar kelompok seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu, individu dan kelompok atau antara kelompok dan kelompok yang masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda. Berbagai perbedaan yang

menimbulkan benturan tersebut jika tidak terselesaikan, maka akan melahirkan kekerasan.

Akan tetapi, tidak semua konflik, akan berakhir dengan kekerasan, jika konflik tersebut tetap berada dalam koridor tata aturan sehingga konflik dapat diselesaikan dengan mekanisme yang baik. Bila keadaan system sosial masyarakat belum mapan dan dalam keadaan tidak stabil, biasanya lembaga penyelesaian konflik tidak atau belum berfungsi dengan baik, akhirnya banyak persoalan pertentangan antar masyarakat di dalam sistem tersebut cenderung tidak dapat diselesaikan dengan baik. Ujung dari konflik yang tidak dapat terselesaikan dengan baik adalah munculnya kekerasan.

2.1.2 Penyebab Konflik

Konflik merupakan bagian dari sebuah interaksi sosial manusia untuk mencapai tujuan atau harapannya. Sebagai proses sosial, konflik di latar belakang oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu yang terlibat dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut meliputi perbedaan fisik, kepentingan, kebutuhan, pengetahuan, adat istiadat, dan keyakinan. Dengan ciri-ciri individual yang terdapat dalam interaksi sosial, konflik menjadi bagian yang akan selalu ada (*inherent*) dalam dinamika sosial suatu masyarakat. Hampir tidak pernah kita temukan suatu masyarakat tanpa konflik, baik antar anggota maupun antar kelompok masyarakat. Pada prinsipnya, suatu konflik dapat terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang terhalang upayanya dalam mencapai tujuan. Hal itu dapat disebabkan perbedaan pandangan terhadap tujuan itu sendiri, norma-norma sosial (yang ingin diubah), maupun terhadap tindakan dalam masyarakat. Apabila sanksi terhadap perbedaan tersebut tidak tegas (tidak berwibawa), dengan sendirinya, Langkah pertama menuju konflik bisa terjadi, situasi tersebut disebut disorganisasi. Disorganisasi terjadi apabila perbedaan antara tujuan individual atau kelompok dan pelaksanaannya terlalu besar. Soerjono Soekanto mengemukakan empat faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat, yakni perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial :

a. Perbedaan antar individu

Setiap manusia tentu memiliki pendirian dan perasaan berbeda satu dengan yang lainnya. Coba perhatikan diri anda sendiri dan teman-teman sekelas, tentu anda akan menemukan adanya perbedaan pendirian dan perasaan antara diri anda dengan teman-teman anda atas sesuatu hal. Perbedaan pendirian tersebut dapat menjadi faktor penyebab konflik.

b. Perbedaan kebudayaan

Anda tentu sudah tahu bahwa kepribadian seseorang sedikit banyak dibentuk oleh kelompoknya. Secara sadar atau tidak, seseorang akan terpengaruh oleh pola-pola pemikirian dan pendirian dari kelompoknya. Sebagai contoh seseorang anak dibesarkan dalam sebuah masyarakat yang menjunjung tingggi nilai kesopanan tentu akan terpengaruh untuk bersikap sopan ketika bertemu atau berbincang dengan orang lain. Sebaliknya, anak yang dibesarkan dalam sebuah masyarakat yang tidak memperdulikan nilai kesopanan tentu akan cenderung mengabaikan kesopanan ketika bertemu atau berbincang dengan orang lain. Dari contoh ini terlihat bahwa perbedaan kepribadian seseorang tergantung dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan dan perkembangan kepribadian orang tersebut. Pebedaan kepribadian individu akibat pola kebudayaan yang berbeda seperti itu tidak jarang menjadi penyebab terjadinya konflik antar kelompok masyarakat. Interaksi sosial antar individu atau antar kelompok dengan pola kebudayaan yang cenderung berlawanan dapat menimbulkan rasa marah dan benci sehingga berakibat konflik.

c. Perbedaan kepentingan

Perbedaan kepentingan antar individu maupun kelompok merupakan faktor lain penyebab konflik atau pertentangan. Setiap individu tentu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu. Demikian pula dengan kelompok, setiap kelompok tentu memiliki kepentingan berbeda-beda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu. Kepentingan itu dapat menyangkut kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai contoh, hubungan antara

pemerintah daerah dan pengusaha tertentu. Ada pejabat pemda melihat hubungan itu sebagai cara untuk menarik investasi pengusaha dalam pembangunan daerah. Ada juga sebagai pejabat yang melihat hubungan itu sebagai kesempatan untuk mengisi pundi-pundi keuangan pribadinya dengan cara perkolasi dengan pengusaha tersebut. Sementara itu, pihak pengusaha melihat hubungan itu sebagai kesempatan untuk mendapatkan proyek pemerintah dan menambah keuntungan bisnis nya.

d. Perubahan sosial

Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang terus berubah seiring dengan berkembangnya kebutuhan dan pengetahuannya. Coba perhatikan masyarakat kita saat ini dan bandingkan dengan keadaan sebelumnya sekitar 10 atau 20 tahun yang lalu. Tentu sangat berbeda, perubahan-perubahan tersebut tentu saja memengaruhi cara pandang sebagai anggota masyarakat terhadap nilai, norma, dan pola perilaku masyarakat. Apabila jika perubahan itu berlangsung dengan cepat dan meluas. Muncul lah perilaku-perilaku lain yang dianggap oleh sebagai anggota masyarakat lain sebagai perilaku "berlawanan, aneh, dan bertentangan" dengan kebudayaan masyarakatnya. Situasi seperti ini dapat memunculkan konflik atau pertentangan. Sebagai contoh, konflik antara kaum muda dan kaum tua. Biasanya, kaum muda cenderung ingin merombak pola perilaku atau tradisi masyarakatnya, sedangkan kaum tua ingin tetap mempertahankan pola perilaku tradisi nenek moyangnya. Hal yang sama dapat kita saksikan dari proses perubahan masyarakat pedesaan di Indonesia beberapa decade belakangan ini. Masyarakat pedesaan Indonesia saat ini sedang mengalami proses perubahan dari masyarakat yang tradisional ke masyarakat industry. Nilai-nilai tradisional seperti nilai ke gotong royong berganti menjadi nilai kontrak kerja dengan upah yang disesuaikan dengan jenis pekerjaannya.

2.1.3 Konflik Sosial

Berdasarkan bentuknya, Lewis A. Coser membedakan konflik atas dua bentuk, yakni konflik realistis dan non realistis

a. Konflik realistis berasal dari kekecewaan individu atau kelompok terhadap sistem dan tuntutan-tuntutan yang terdapat dalam hubungan sosial. Para karyawan yang mengadakan pemogokan melawan manajemen perusahaan merupakan salah satu contoh konflik realistis.
b. Konflik non-realistis adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan persaingan yang antagonistis (berlawanan), melainkan dari kebutuhan pihak-pihak tertentu untuk meredakan ketegangan. Dalam masyarakat tradisonal, pembalasan dendam lewat ilmu gaib merupakan bentuk konflik nonrealistis.

   Demikian juga halnya dengan upaya mencari kambing hitam yang sering terjadi dalam masyarakat yang telah maju.

Menurut Lewis A. Coser, bahwa dalam situasi tertentu, elemen konflik dapat berbentuk realistis sekaligus non reaistis. Misalnya, sikap perlawanan dalam aksi pemogokan melawan majikan, tidak hanya timbul sebagai akibat dari ketegangan hubungan antara buruh dan majikan. Sikap perlawanan itu juga dapat timbul karena ketidakmampuan menghilangkan rasa permusuhan terhdap figure-figur yang berkuasa, misalnya figure ayah dirumah yang sangat otoriter. Dengan demikian, energi agresif mungkin terbentuk lewat proses-proses interaksi lain sebelum ketegangan dan konflik itu muncul.

Berdasarkan kedua bentuk konflik diatas, Lewis A. Coser membedakan adanya konflik in-group dan konflik out-group. Konflik in-group adalah konflik yang terjadi dalam kelompok itu sendiri. Contoh konflik in group adalah konflik yang terjadi antar anggota dalam suatu geng. Konflik out group adalah konflik yang terjadi antara suatu kelompok dan kelompok lain. Sebagai contoh, konflik yang terjadi antara masyarakat Dayak dan masyarakat Madura beberapa tahun lain, atau antar kelompok agama di Maluku.

Menurut (Fisher, 2001), konflik dibagi menjadi kedalaman tiga bentuk, yaitu :

a. Konflik latent, sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat kepermukaan sehingga dapat ditangani secara efektif.
b. Konflik terbuka, adalah konflik yang berakar dalam dan sangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai macam efeknya
c. Konflik dipermukaan, memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalapahaman mengenai sesuatu yang dapat diatasi dengan menggunakan komunikasi.

Selain itu Soerjono Soekanto dalam Furkan Abdi (2009), membagi konflik sosial ke dalam lima bentuk khusus berdasarkan tingkatannya, yaitu sebagai berikut :

a. Konflik pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya
b. Konflik rasial, yaitu konflik yang timbul akibat perbedaan ras
c. Konflik antara kelas-kelas sosial, yaitu konflik yang disebabkan adanya perbedaan kepentingan antar kelas sosial
d. Konflik politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis seseorang atau kelompok
e. Konflik yang bersifat internasional, yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan Negara.

2.2 Pemerintah Desa

2.2.1 Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembina

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bineka Tunggal Ika. Dengan tujuan dasar untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawarahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2.2 Peran Pemerintah Desa

Perkelahian antar kelompok tidak begitu mendapat perhitungan oleh pemerintah desa. Ketika sebuah perkelahian hanya terjadi sekali tidak berdampak pada citra buruk pemerintahan, maka perilaku itu dipandang sebagai sesuatu yang tidak berbahaya. Namun ketika perkelahian atau pertikaian terjadi berulang kali dan berujung pada cap buruk pemerintahan desa tersebut barulah perkelahian mendapatkan perhatian. Kembali diulangi, pemerintah pada hakekatnya dibutuhkan untuk menjaga harmonis asi dalam masyarakat serta lepas dari segala bersinggungan internal masyarakat. Perkelahian antar faktor penyebab yang telah disimpulkan oleh penulis bisa di akibatkan oleh beberapa elemen di luar masyarakat itu sendiri. Adanya aktor luar bisa memicu perkelahian itu terjadi.

Mendistribusikan kekayaan secara adil adalah bagian tugas pemerintah sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Konflik dapat diibaratkan seperti api yang dapat membakar dan menjalar kemana- mana dan memusnahkan jika tidak ditangani secara baik. Proses pengendalian konflik itu bermula dari persepsi tentang konflik itu sendiri, apa komponennya dan bersumber dari mana, kemudian menuju ke tahap realisasi, penghindaran, intervensi, pemilihan strategi dan implementasi dan evaluasi dampak yang ditimbulkan oleh konflik. Untuk dapat mengatasi konflik yang ada pemimpin harus melakukan mediasi. Dan yang paling sesuai untuk menjadi mediator dalam hal ini adalah pemimpin wilayah misalnya kepala desa, yang mengerti betul akan kondisi warganya dan tentunya dihormati oleh warganya. Namun pengetahuan mengenai penyelesaian sengketa alternatif sendiri belum terlalu dipahami oleh kades ataupun lurah.

Terdapat banyak kendala yang di hadapi Pertama, kurangnya pemahaman kepala desa ataupun lurah mengenai tugas dan pokoknya sebagai pemimpin sekaligus dapat menjadi mediator dalam penyelesaian konflik sosial di masyarakatnya, sehingga perlu dilaksanakannya penyuluhan sekaligus sosialisasi mengenai penyelesaian konflik dengan menggunakan jasa mediator serta tugas dan fungsi mediator itu sendiri.

Secara Khusus ada tiga macam bentuk pengendalian konflik sosial:

a. Konsiliasi

   Bentuk pengendalian konflik seperti ini dilakukan melalui Lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan diskusi dan pengambilan keputusan yang adil di antara pihak-pihak yang bertikai. Konsiliasi (*conciliation*) adalah suatu bentuk pengendalian konflik sosial yang utama. Pengendalian ini terwujud melalui lembaga melalui lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan. Pada umunya, bentuk konsiliasi terjadi pada masyarakat politik. Lembaga parlementer yang di dalamnya terdapat berbagai kelompok kepentingan akan menimbulkan

pertentangan-pertentangan. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, biasanya lembaga ini melakukan pertemuan untuk jalan damai.

b. Mediasi

Pengendalian konflik dengan cara mediasi dilakukan apabila kedua pihak yang berkonflik sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator dan mediator itu sendiri adalah kepala desa. Pihak ketiga ini akan memberikan pemikiran atau nasihat-nasihatnya tentang cara terbaik menyelesaikan pertentagan mereka. Sekalipun pemikiran atau nasihat pihak ketiga tersebut tidak mengikat, namun cara pengendalian ini kadang-kadang menghasilkan penyelesaian yang cukup efektif. Cara seperti ini efektif mengurangi rasional yang biasanya timbul didalam konflik. Adapun peran yang dilakukan oleh kepala desa bekerja sama dengan pemuka masyarakat dan pemuda-pemuda yang berkonflik serta kepolisian dalam mengatasi permasalahan tesebut yaitu dengan melakukan perdamaian dengan mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik, kemudian didamaikan secara musyawarah/mufakat.

c. Penengah

Hal yang dilakukan apabila kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk menerima atau hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara mereka.

2.2.3 Fungsi Pemerintah Desa

Sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan. Pasal 26 (1) menyebutkan : “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”. Selanjutnya pasal 26 (4) huruf k, menyatakan : Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masayarakat didesa".

Fungsi Pemerintah Desa sebagai penyelesai perselisihan sangat strategis dala mendukung bekerjanya peradilan negara di Indonesia, apalagi ipso facto negara ini tengah mengalami perubahan dan pergeseran dari gemeinschaft (paguyuban) ke gesselschaft (patembayan). Dalam rangka memperkuat nilai-nilai paguyuban maka fungsi kepala desa ataupun pemerintah desa sebagai penyelesai perselisihan berbasis kearifan lokal yang telah dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus di dayagunakan semaksimal mungkin sebagai ikhtiar untuk memperluas akses keadilan bagi warga masyarakat.

Fungsi Pemerintah desa/Kepala desa dalam melaksanakan kewajiban perselisihan masyarakat sebagaimana yang dimaksud pasal 26 (4) huruf k. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2004 tentang Desa yang menyatakan: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala desa/Pemerintah desa berkewajiban : menyelesaikan perselisihan/ pertikaian masyarakat di Desa menurut hemat peneliti tidak lain adalah fungsi pemerintah desa atau kepala desa untuk berperan sebagai mediator.

2.3 Pemuka Masyarakat / Adat

2.3.1 Pengertian Pemuka Masyarakat/ Adat

Pemuka masyarakat biasanya merupakan sosok orang yang sangat disegani, mejadi panutan, selalu didengar dan diminta pendapatnya untuk banyak hal yang berkaitan dengan keputusan tentang sesuatu rencana kegiatan masyarakat, dapat sebagai teladan hidup baik secara pribadi maupun kehidupan keluarganya. Figure kepemimpinan maupun kehidupan sosialnya sangat melekat erat pada diri pribadi pemuka masyarakat. Sehingga sangat mendapatkan predikat atau julukan pemuka masyarakat. Bukan orang pendatang baru yang meskipun pandai dan kaya raya akan otomatis menjadi pemuka masyarakat, karena pemuka masyarakat sebagai predikat yang dianuhgerakan dengan cuma-cuma, namun tidak setiap orang

mampu meraihnya, karena predikat itu tidak bisa diusahakan atau direncanakan untuk diberikan pada seseorang, namun siapapun orang yang mendapat julukan pemuka masyarakat biasanya sangat kesimpulannya pemuka masyarakat adalah orang yang angat luar biasa dengan kepribadian dan sikap mempesona/terpuji, menjadi panutan atau contoh, kehadirannya dapat membuat suasana menjadi nyaman dan damai. terhormat dan memang pantas untuk dihormati, karena kepribadian yang mempesona yang membuat orang segan dan mengaguminya.

2.3.2 Peran Pemuka Masyarakat / Adat

Peran pemuka masyarakat dalam hal ini sangat begitu dibutuhkan, karena dampak dari masalah ini begitu serius dan perlu penanganan yang serius pula oleh pemuka masyarakat daerah setempat yang bertikai. Oleh karena itu perlu kita ketahui factor apakah yang memicu terjadinya konflik dan mengetahui peran pemuka masyarakat dalam menyelesaikan konflik sosial tersebut. Adapun peran pemuka masyarakat dalam mengatasi konflik sosial dalam meredam dan menyelesaikan gejolak yang berpotensi terhadap acara yang sering digunakan dalam penyelesaian konflik yaitu dengan melakukan negosiasi, mediasi dan fasilitasi. Cara ini lazim digunakan baik ditingkat lokal, nasional maupun dunia internasiona dalam resolusi konflik. Pihak pemerintah desa, pemuka masyarakat maupun pihak kepolisian yang bukan terlibat dalam konflik akan berperan sebagai Negosiator, Mediator dan Fasilitator. Peran yang dilakukan oleh pemuka masyarakat setempat serta pihak kepolisian bekerja sama dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan perdamaian dengan mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik, kemudian didamaikan.

2.3.3 Fungsi Pemuka Masyarakat/ Adat

Pemuka masyarakat melakukan mediasi agar permasalahan ini mencapai titik perdamaian. Pemerintah kecematan dan pemuka masyarakat memanggil para pelaku dari konflik yang terjadi. Alasannya agar permasalahan ini kita ketahui apa penyebab dari masalah tersebut, sehingga

terjadi konflik yang begitu sangat serius. Pemuka masyarakat benar-benar melakukan mediasi untuk mencari tahu kejelasan dari konflik sosial yang terjadi di masyarakat.

Campur tangan pemuka masyarakat beserta pemerintah kelurahan dan pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik sosial tersebut bertujuan untuk mengupayakan kedua kelompok masyarakat ini bisa hidup berdampingan tanpa ada pertentangan. Berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan konflik tersebut, maka pemuka masyarakat dari kedua desa yang bertikai memfasilitasi pemerintah kecematan maupun dari pemerintah kabupaten beserta kepolisian untuk melakukan melakukan pertemuan dengan pelaku konflik. Pemuka masyarakat memfasilitasi pemerintah dari kecematan untuk berkumpul dan membahas permasalahan yang menjadi dasar terjadinya konflik. Ini merupakan salah satu langkah yang ditempuh oleh pemuka masyarakat demi mencapai titik temu atau akar permasalahan dari konflik yang terjadi. Hal ini dibenarkan oleh aparat kepolisian, dimana mereka bekerja sama dengan pemerintah desa, pemuka masyarakat serta masyarakat itu sendiri guna untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan mereka pendekatan-pendekatan pada masyarakat yang berkonflik agar permasalahan yang ada dapat dipecahkan.

2.4 Peran

Teori peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi (Sarwono, 2002). Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia mengharapkan berperilaku secara tertentu.

Menurut Levinson sebagaimana dikutip oleh Soejono (2002:200), Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang

dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Akan tetapi biasanya dalam suatu organisasi dibentuk suatu kerja yang melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia dan satuan kerja tersebutlah yang secara fungsional bertanggung jawab dalam melakukan berbagai kegiatan dan mengambil berbagai langkah dalam manajemen sumber daya manusia. (Siagian, 2001: 31). Teori peran (role theory) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. istilah peran diambil dari dunia teater yang diartikan sebagai seseorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh yang diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.

2.4.1 Peran Tokoh Adat

Peran tokoh adat dalam pengelolaan konflik sosial Dauh, I. P.A.A. Sukadana, I. K. , & Widyantara, I. M. M. (2020) menerangkaan bahwa peran tokoh adat adalah tatanan adat yang menjadi aspek sosiologis dari tata cara penanganan konflik yang melembaga merupakan realitas yang masih ada dalam masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia pada umumnya masih menerapkan nilai-nilai adat yang telah diterapkan sejak lama sebagai panutan dalam kehidupan bermasyarakat. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012, telah mendorong pengaturan adat dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat. Masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah pengaturan penanganan konflik sosial oleh kepala tokoh adat di Indonesia menurut UU No. 7 Tahun 2012? Dan peran lembaga adat dalam penanganan konflik sosial di masyarakat Indonesia yang heterogen. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiolegal. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan penanganan konflik sosial menurut UU No. 7 Tahun 2012 Lembaga Adat berperan dalam pencegahan konflik, penanganan konflik, pemulihan pasca konflik, resolusi konflik, dan transformasi konflik antara masyarakat. Peranan tatanan masyarakat adat dalam penanganan

suatu konflik bagi kelompok masyarakat Indonesia meningkatkan atau memupuk toleransi dan saling menghargai kebebasan dalam menjalankan aktivitas masyarakat. Dengan tumbuhnya toleransi maka konflik antar masyarakat dapat dihindari.

2.4.2 Tokoh Masyarakat

Peranan tokoh masyarakat oleh Ida, R. (2018) konflik merupakan suatu perselisihan antara dua atau beberapa individu, kelompok atau organisasi. Konflik terjadi dilingkungan masyarakat di wilayanya tersebut. Konflik melibatkan antara penganut organisasi keagamaan yang berkembang di desa tersebut. Oleh karena itu, dalam kehidupan bermasyarakat tentu saja dibutuhkan sekelompok orang yang memiliki kedudukan dan berpengaruh terhadap keharmonisan kehidupan masyarakatnya yang disebut dengan tokoh masyarakat.

Dari hasil penelitian mengenai peran tokoh masyarakat dalam mengatasi konflik antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan kepala desa, masyarakat dengan pemuda, serta pemuda dengan pemuda. Dapat dilihat dari :

a) Tokoh masyarakat mampu meredam terjadinya konflik, yaitu para tokoh masyarakat melakukan kesepakatan dengan warganya agar tidak terpengaruh lagi terhadap profokasi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga konflik tidak lagi memuncak.
b) Sebagai panutan warganya, jika tokoh masyarakat bisa membrikan contoh yang baik kepada warganya tentu saja warganya akan bersikap baik.
c) Tokoh masyarakat menjadi mediator dalam proses mendamaikan konflik. Dalam proses mendamaikan konflik dibutuhkan beberapa tahap mediasi, dalam tahap mediasi itu dibutuhkan seorang pihak ketiga (mediator) sebagai pendamping dan penasehat dalam proses mediasi.

2.4.3 Tokoh Pemuda

Peranan generasi mudah Indonesia atau peran pemuda Indonesia adalah (*Generation of Change*) oleh sebab itu bagaimana dalam menangani pengelolaan konflik sosial yang kerap kali terjadi di lingkungan masyarakat oleh Tuhuteru, L. (2020) Hasil penelitian ditemukan bahwa pola pendidikan karakter generasi muda pasca konflik sosial Ambon peran PKn dalam membina karakter generasi muda secara inovatif sesuai dengan formatnya, sehingga para guru merasa keleluasan untuk menentukan pilihan metode pembelajaran PKn benar-benar membina dan membentuk watak karakter generasi muda yang demokrastis, sikap menghargai orang lain dan sadar akan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara pasca konflik sosial Ambon.

2.4.4 Tokoh Gereja

Reorientasi polri yang berperan dalam penyelesaian konflik harus dilakukan oleh Suparmin, S. (2014) menerangan bahwa untuk memahami strategi dan mekanisme penanganan konflik sosial untuk mencapai perdamaian yang sejalan dengan tuntutan hukum, demokrasi, keadilan, dan kebenaran, serta hak asasi manusia. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam penanganan konflik sosial, Polri sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab menjaga keamanan negara dituntut untuk memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional dan proporsional sejalan dengan tuntutan hukum, demokrasi, keadilan dan kebenaran, serta hak asasi manusia.

2.5 Kerangka Konsep

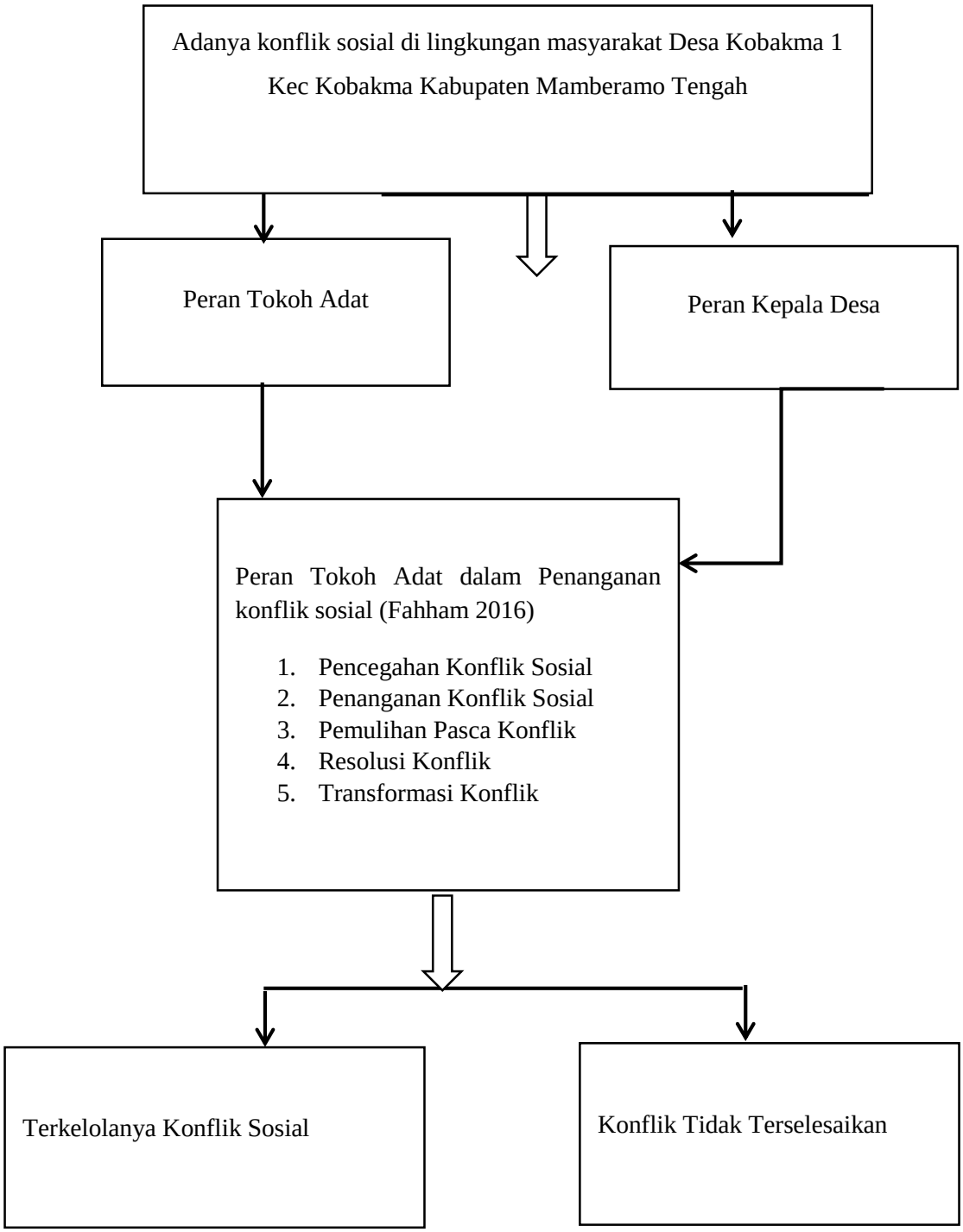

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian deskriptif ini biasanya dilakukan terhadap satu variabel yang diteliti dengan mencoba menguraikan secara rinci yang sesuai dengan masalah penelitian yang diinginkan. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai karakteristik suatu populasi atau fenomena tertentu.

Menurut Sarwono (2006) dalam penelitian kuantitatif peneliti berbaur menjadi satu dengan yang diteliti sehingga peneliti dapat memahami persoalan dari sudut pandang yang diteliti itu sendiri. Sasaran utama penelitian kuantitatif ialah manusia karena manusia lah sumber masalah dan sekaligus penyelesaian masalah Penelitian kuantitatif menurut Ruslan (2013) bertujuan untuk mendapat pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut menggunakan data yang pasti merupakan kriteria dari penelitian secara kuantitatif di mana pengertian dari data yang pasti itu sendiri merupakan data yang sebenarnya terlihat dan terucap, tetapi mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut, diperlukan beberapa sumber data dan berbagai teknik pengumpulan data.

Penelitian kuantitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan

analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut. Peneliti berpendapat bahwa penelitian deskriptif kuantitatif dapat lebih menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang dapat menggambarkan suatu fenomena sehingga lebih sistematis. Fenomena tersebut baik berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Selama menjalankan penelitian di pemerintah desa kabupaten Mamberamo Tengah daerah provinsi papua pegunungan peneliti mengamati berbagai fenomena konflik sosial di lingkungan masyarakat dan bagaimana peran tokoh adat dalam pengelolaan konflik sosial di Desa Kobakma 1 yang belum kompeten dalam sistem informasi untuk melaksanakan tugas. Sehingga lokasi penelitian merupakan tempat yang dipilih penulis untuk melaksanakan penelitian ini. Waktu penelitian dalam penelitian ini disesuaikan dengan tercapai nya hasil dari penelitian ini.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang konflik sosial yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat kemudian dirumuskan dalam rumusan dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka, adapun fokus penelitian yang berpijak dari rumusan masalah. Fokus penelitian ingin mengetahui bagaimana peran tokoh adat dalam pengelolaan konflik sosial di lingkungan masyarakat di desa kobakma 1.

Peran tokoh adat dalam penanganan konflik sosial (Fahham, 2016)

1. Pencegahan Konflik
2. Penanganan Konflik
3. Pemulihan Pasca Konflik
4. Resulusi Konflik
5. Transformasi Konflik

3.4 Informan Penelitian

Informasi adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Penelitian mengenai kepala adat di desa kobakma 1 memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan konflik penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih akurat. Oleh sebab itu, informan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Informan/Responden Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Bohol Mabel	Tokoh Adat Distrik Kobakma
2	Mus Endambia	Kepala Desa Kobakma 1

Sumber : dioleh peneliti 2023

Informan/ responden yang digunakan dalam penelitian ini ditetapkan dengan cara *snowball sampling. Snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula - mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Dalam penentuan sampel, pertama - tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak (Sugiyono, 2005 : 97)

3.5 Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder

a. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden/ informan penelitian dan merupakan data yang belum pernah diolah, yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara atau observasi. Adapun data primer dalam penelitian ini antara lain ialah data hasil observasi yang peneliti

lakukan, yaitu mengenai kompetensi kepala adat dalam pengelolan konflik sosial di Mamberamo Tengah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh di lokasi tempat penelitian dilakukan atau di lembaga terkait, yang merupakan yang telah tersedia atau data yang telah pernah diolah, antara lain dalam bentuk sumber tertulis seperti laporan, dan statistik, peraturan perundang – undangan dan sebagainya. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya seperti struktur pemerintahan desa, uraian tugas jabatan, data lembaga lainnya, peraturan perundang – undangan dan data lainnya yang dianggap dapat mendukung analisis.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

3.6.1 Wawancara Mendalam (in-depth interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewer) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2013:186). Wawancara mendalam bertujuan untuk memperoleh data dan informasi kuantitatif secara langsung dari sumber data/responden. Sedangkan teknik wawancara bersifat terbuka dengan tujuan agar responden dapat memberikan jawaban dan pandangan seluas-luasnya. Agar wawancara tetap berada dalam konteks penelitian maka wawancara disertai pedoman wawancara (*interview-guide*) yang dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan pada penulisan tesis ini.

Adapun wawancara mendalam yang dilakukan pada penelitian ini yaitu peneliti melakukan tanya-jawab langsung dengan responden/informan penelitian agar memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan terkait Peran Tokoh Adat dalam pengelolaan konflik sosial Kabupaten Mamberamo Tengah Distrik Kobakma Desa Kobakma 1.

3.6.2 Observasi

Observasi adalah kegiatan peneliti mengamati secara langsung terhadap subjek penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan ialah observasi partisipasi secara pasif, untuk mengamati tentang bagaimana peran tokoh adat dalam pengelolan konflik sosial di lingkungan masyarakat.

Menurut Sugiyono (2014;227), observasi partisipatif pasif yaitu dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut.

3.6.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2014;240), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kuantitatif.

Studi dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain mengumpulkan data berupa peraturan perundang-undangan, profil instansi, dan data lain yang dianggap relevan dan mendukung analisis.

3.7 Teknik Pengelolaan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui tahap: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*conclusing*).

3.7.1. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan dta yang lain. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil wawancara terhadap narasumber kursus calon pengantin dan peserta kursus calon pengantin serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini.

3.7.2. *Classifying* (Klasifikasi)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observsi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipihah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

3.7.3. *Verifying* (Verifikasi)

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.

3.7.4. *Concluding* (Kesimpulan)

Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir dalam lahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah *concluding*, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya: *editing, classifying, dan verifying analyzing.*

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Dalam hal analisis data kuantitatif, Bogdan dalam Sugiyono (2014;244) menyatakan bahwa: analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Proses analisis data dalam penelitian kuantitatif terdiri dari :

3.8.1. Analisis Sebelum Di Lapangan

Penelitian kuantitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan (Sugiyono, 2014:245).

3.8.2. Analisis Setelah Di Lapangan

Analisis data dalam penelitian kuantitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Miles and Hibernian dalam Sugiyono (2014;246), aktivitas dalam analisis data kuantitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu :data reduction (reduksi data), data display (*display data*), dan *conclusion/verification* (kesimpulan/verifikasi). Dengan demikian, analisis data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil kegiatan pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi, yang kemudian data yang telah diperoleh tersebut diverifikasi secara induktif untuk dapat mengambil kesimpulan hasil penelitian.

3.8.3. Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini maka ditarik kesimpulan dari "Analisis Sebelum Di Lapangan dan Analisis Setelah Di Lapangan" itu berbeda karna Analisis Setelah Di Lapangan dilakukan mengunakan analisis data kualitatif secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, sehingga data sudah jenuh. Teknik kegiatan pengumpulan data dengan mengunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi, yang kemudian data yang telah diperoleh tersebut diverifikasi secara induktif untuk dapat mengambil kesimpulan penelitian sedangkan pada Analisis Sebelum Di Lapangan fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah penelitian masuk dan selama di lapangan.

3.9 Teknik Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007:320). Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility, transferability, dependability, dan confirmability* (Sugiyono, 2007:270). Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Ada pun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

3.9.1. Credibility

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/ kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru.

Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap. Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/ benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

b. Meningkatkan Kecermatan Dalam Penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen- dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

c. Triangulasi

Wiliam Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2007:273).

1) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu

kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data (Sugiyono, 2007:274).

2) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono, 2007:274).

3) Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 2007:274).

d. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya (Sugiyono, 2007:275).

e. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data- data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya (Sugiyono, 2007:275).

f. Mengadakan *Membercheck*

Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan (Sugiyono, 2007:276).

3.9.2. Tranferability

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2007:276). Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

3.9.3. Dependability

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

3.9.4. Confirmability

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji

confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

Tahap pengolahan konflik sosial :

1. Dimana peran tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam pencegahan konflik antara masyarat yang terjadi di kec kobakma kabupaten mamberamo tengah?
2. Kapan peran tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam penanganan konflik antara masyarakat kec. kobakma kab. mamberamo tengah?
3. Siapa peran tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam pemulihan pasca konflik di kec kobakma kab mamberamo tengah?
4. Apa peran resolusi konflik oleh tokoh adat dan tokoh masyarakat kec kobakma kab mamberamo tengah?
5. Bagaimana peran tokoh adat dan tokoh masyarakat terhadap transformasi konflik di kec kobakma kab mamberamo tengah?

BAB IV
GAMBARAN UMUM

4.1 Desa Kobakma 1

Desa Kobakma merupakan salah satu desa yang ada di distrik Kobakma, Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan. Desa Kobakma 1 terletak di sebelah selatan Distrik Kobakma dan berbatasan langsung dengan Desa Seralema, sekaligus menjadi pintu gerbang untuk memasuki Kabupaten Yalimo Papua Pegunungan.

Kondisi Geografis

Secara geografis, Desa Kobakma 1 terletak di :

1. Koordinat : 2. 88° LS ; 139, 41° BT
2. Luas wilayah : 328 Km2
3. Topografi : Dataran tinggi
4. Jumlah penduduk di Desa kobakma : 8707
5. Batas Wilayah

   Utara : Desa kobakma 2

   Selatan : Desa seralema

   Timur : Desa broges

   Barat : Desa baluklabuk

6. Potensi Desa

   Desa Kobakma 1 memiliki berbagai potensi yang cukup baik sebagai sebuah desa. Adapun potensi tersebut terlihat dari letak/ wilayah, sumber daya alam desa (SDA), sumber daya manusia (SDM), industri, dan infrastruktur.

7. Letak/Wilayah

   Desa Kobakma memiliki letak wilayah yang cukup strategis karena dilewati oleh jalan lintas provinsi yang menghubungkan beberapa provinsi di Mamberamo Tengah. Selain menghubungkan antar provinsi, jalan tersebut juga menjadi jalan utama yang menghubungkan antar kabupaten dari mamteng menuju kota wamena. Sehingga dengan adanya jalan tersebut bisa menjadi salah satu potensi untuk mengembangkan desa, terutama perekokonomian masyarakat.

8. Sumber Daya Alam

   Salah satu sumber daya alam di Desa Kobakma 1 adalah di bidang perkebunan. Karena sebagian besar wilayah di Desa Kobakma 1 ini digunakan sebagai lahan bercocok tanam umbi-umbian dan sayur mayur yang dikelola oleh warga di Desa Kobakma 1 sendiri. Selain bercocok tanam, juga terdapat beberapa perkebunan singkong, kacang tanah, cabe, buah merah dsb. Yang dikelola oleh warga, sebagai matapencaharian mereka. Ada pula lahan yang digunakan oleh warga untuk sektor pertanian sebagai penunjang kebutuhan pangan.

9. Sumber Daya Manusia

   Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah desa kobakma 1, jumlah warga pada tahun 2020 mencapai 8707 orang yang terbagi menjadi 4353. 5 orang laki-laki dan 4353. 5 orang perempuan. Dengan jumlah KK mencapai 8712 kk.

10. Pendidikan :

    Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di Desa Kobakma 1 merupakan, desa kobakma 1 mayoritas penduduk tingkat pendidikan adalah tamanatan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Mengenah Pertama (SMP), dan Sekolah Mengenah Atas (SMA)

4.2 Pengelolaan Konflik Sosial di Desa Kobakma 1

Penyebab konflik sosial di Desa Kobakma 1 merupakan masalah yang terjadi sesama warga kedua suku Yali dan Gem bagi masyarakat. Karena Sebagian besar telah mengarah pada suatu kekerasan sosial lingkungan dan telah meluas pada berbagai lapisan masyarakat Mamberamo Tengah. Pada umumnya konflik diakibatkan oleh perbedaan pendapat, pemikiran, ucapan, dan perbuatan. Akibat terjadinya konflik/pertikaian yaitu adanya interaksi sosial karena interaksi sosial merupakan hubungan antar manusia yang sifat dari hubungan tersebut adalah dinamis artinya hubungan itu tidak statis, selalu mengalami dinamika. Hal yang muncul ketika satu manusia berhubungan dengan manusia lainnya adalah :

a. Hubungan antar individu satu dan individu lain
b. Individu dan kelompok
c. Kelompok dan kelompok

Interaksi sosial antara kelompok-kelompok manusia terjadi pula di dalam masyarakat. Interaksi tersebut lebih nyata ketika terjadi benturan antara kepentingan individu dan kelompok, terjadi kerja antara kelompok sosial, sebaliknya jika diantara kelompok terjadi, maka terdapat beberapa perbedaan, maka kemungkinan akan terjadi konflik antara kelompok sosial. Beberapa konflik sosial yang pernah terjadi yaitu Konflik Kekerasan di Desa Kobakma 1 Fenomena konflik kekerasan telah menunjukkan intensitasnya, baik dalam bentuk konflik horizontal anatara warga, konflik suatu golongan keagamaan dengan masyarakat sekitarnya dan yang masih segar di lingkungan Desa Kobakma 1.

Tabel 4: Penyebab konflik sebagai berikut :

No	Pihak yang berkonflik	Penyebab	Dampak
1	Kelompok dan kelompok	Dana Desa	Terjadi Pertikaian Sampai Terluka
2	Individu dan kelompok	Di Masyarakat Terjadi	Terjadi Pertikaian Sampai Meninggal Dunia

		Pertikaian Antara Pemuda Dan Orangtua	
3	Kelompok dan kelompok	Pembangunan Gedung Gereja	Terjadi Keributan Antara Masyarakat
4	Individu dan kelompok	Ada Masyarakat Yang Membuka Lahan Milik Warga Lain	Terjadi Keributan Antara Masyarakat
5	Individu dan kelompok	Perpindahan Penduduk	Terjadi Keributan Antara Masyarakat Dan Kepala Desa
6	Kelompok dan kelompok	Tempat Penjualan Warga	Terjadi Keributan Antara Warga
7	Kelompok dan kelompok	Pemilihan Kepala Desa	Terjadi Keributan, Pertikaian Sampai Terluka
8	Individu dan kelompok	Pembangunan Rumah Warga	Kencemburuan Hingga Terjadi Keributan
9	Hubungan antara individu satu dan invidu lain	Membentuk Kelompok – Kelompok	Keributan Sampai Pertikaian
10	Individu dan kelompok	Perjudian	Terjadi Keributan Antara Orangtua Dan Kepala Desa

BAB V1
PENUTUP

6.1 Simpulan

1. Sehubungan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran tokoh adat dalam pengelolaan konflik sosial di Desa.
2. Sehubungan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Kepala Desa dalam pengelolaan konflik sosial di Desa Kobakma 1.
3. Sehubungan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran tokoh adat dan Kepala Desa serta Pihak Tni/Polri dalam pengelolaan konflik sosial di lingkungan di Desa Kobakma 1.

6.2 Saran

Yang menjadi saran dalam Penelitian ini adalah :

1. Secara akedemis

   penelitian ini untuk menambah hasil keilmuan bidang pemerintahan khususnya peran tokoh masyarakat adat dan pemerintah desa dalam pengelolan konflik sosial
2. secara praktis

   penelitian ini memiliki manfaat kepada pemerintah desa, tokoh adat dan masyarakat dalam menjaga harmoni sosial melalui pengelolaan konflik sosial yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

1. JURNAL

Adityo, R. D. (2017). Studi normatif legalitas peran tokoh masyarakat dalam UU no. 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, *2*(1), 2-26.

Fahham, A. M. (2016). *Peran Tokoh Agama dalam Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Kajian, 15(2), 311-341*.

Rosyid, M. (2017). *Peredam Konflik Agama: Studi Analisis Penyelesaian di Tolikara Papua 2015. Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies, 13(1), 48-81*.

Hadi, W. (2019). *Peranan Satuan Binmas dalam Mencegah Perang Suku di Distrik Kwamki Narama. Jurnal Ilmu Kepolisian, 13(3), 11*.

Thalib, H. H. , & SH, M. (2012). *Sanksi Pemidanaan dalam konflik pertanahan. Kencana*.

Kawer, O. F. S. , Baiquni, M. , Keban, Y. T. , & Subarsono, A. (2018). *Implementasi Kebijakan pembangunan rumah layak huni dengan pendekatan hibrida di kabupaten supiori provinsi Papua. Sosiohumaniora, 20(3), 245-253.*

Dauh, I. P. A. A. , Sukadana, I. K. , & Widyantara, I. M. M. (2020). *Peran Pranata Adat Dalam Pencegahan Konflik Antara Kelompok Masyarakat Adat. Jurnal Preferensi Hukum, 1(1), 133-138.*

Coser, Lewis. 1956. *Fungsi Konflik Sosial.* New York: Pers Bebas.

Ida, R. (2018). *Peran Tokoh Masyarakat Dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Dan Aliran Keagamaan Di Desa Mojorayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun Tahun 2018 (Doctoral dissertation, IAIN PONOROGO).*

Tuhuteru, L. (2020). *Pendidikan Karakter Untuk Generasi Muda Pasca Konflik Sosial Ambon Peran PKn. Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, 12(1), 28-39.*

Nursantari, A. R. (2018). *Konflik Sosial dalam Novel O Karya Eka Kurniawan (Kajian Konflik Sosial Lewis A. Coser). Skripsi Universitas Negeri Surabaya.*

Widyawati, A. (2015). *Akar konflik dalam masyarakat multikultural di karimunjawa. Yustisia Jurnal Hukum, 4(3), 602-616.*

Carlos, J Adam *"Peran Pemerintah Desa Dalam Menyelesaikan Pertikaian Antar Warga Desa tan Ratatotok"*

Kamaluddin Ahmad, Ongki, *"Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Antar sarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015". Vol. 7 No. 1 Maret 2019*

Novri Susan, *Sosiologi Konflik Teori-teori dan Analisis, (Jakarta: Kecana, 2009) intahan Desa" Vol. 7 No. 1, Juli 2018*

Suprapto, S. (2013). *Revitalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Bagi Upaya Resolusi Konflik. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 21(1), 19-38.*

Suwandi Sumartis, Agus Rahmat *"Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Konflik Sosial" Vol. 13 manajemen Konflik: suatu pendekatan psikologi, komunikasi, dan pendidikan (Yogyakarta: Deepublish, 2018)*

Ismail, I. (2012). *Penggabungan Teori Konflik Strukturalist-Non-Marxist dan Teori Fungsionalisme Struktural-Talcott Parsons:(Upaya Menemukan Model Teori Sosial-Politik Alternatif sebagai Resolusi Konflik Politik dan Tindak Kekerasan di Indonesia). ESENSIA: Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin, 13(1), 67-84.*

Poerwadarminta. W. J. S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta:Balai Pustaka. Richek, & Lerner, J. W. 1983. Reading Problems: Diagnosis and Metode Penelitian. Kuantitatif Kualitatif. Di download pada J Sarwono - Kuantitatif Kualitatif, 2006 - academia. edu*

Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.*

J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013*

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.*

Saadah, M. , Prasetiyo, Y. C. , & Rahmayati, G. T. (2022). *Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif. Al-'Adad, 1(2), 54-64.*

2. Proposal

Hassan, M. Z. (2018). Kewajiban Penyelesaian Perselisihan Oleh Kepala Desa Menurut Pasal 26 Ayat (4) Huruf K Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Malang: Universitas Brawijaya*.

3. **Tesis**

TUKWAIN, S. M. F. Metode resolusi konflik antar suku oleh kepala suku di Kota Sorong Provinsi Papua Barat.